



Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Aceh Kreatif Untuk Mengurangi Kemiskinan di Aceh

Agatha Debby Reiza Macella¹, Najamudin¹, Sri Wahyu Handayani¹, Irma Juraida²

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 23661, Indonesia

²Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 23661, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: February 24, 2021
Revised: March 26, 2021
Accepted: April 29, 2021
Available online: April 24, 2021

KEYWORDS

Inovation, Empowerment, Program, Aceh

CORRESPONDENCE

Phone: +6282122698563
E-mail: agathadebby@utu.ac.id

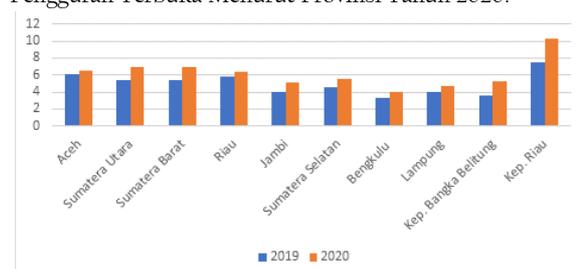
A B S T R A C T

Aceh as one of the special autonomous regions which has a large enough budget compared to other regions makes the Aceh regional government have more useful programs to help alleviate poverty with a variety of superior programs, many regional potentials from various sectors that can be developed. The purpose of this study is to analyze the implementation of community empowerment programs through the Aceh Kreatif program so far and how the conditions of opportunities and challenges can be utilized by local governments in developing products and services from community empowerment through the Aceh Kreatif program. The research method used is a qualitative method, descriptive with the literature study technique. The Aceh Creative Program is one of the 15 flagship programs of the Aceh government which indeed aims to improve the community's economy by emphasizing innovation creativity and utilizing local potential that is spread throughout the region from cities to villages in Aceh, contained in Aceh Qanun No.1 of 2019 concerning the Aceh Medium Term Development Plan (RPJM) for 2017-2022. The performance of the implementation of community empowerment through the Aceh program can be said to be good. 115 Bumdes are developing and getting turnover and obtaining PAG, several businesses were born in the village from community empowerment through the Aceh Kreatif program. Communication of the implementing agency is carried out through Focus Group discussions (FGD) then coordination meetings which are held regularly at the beginning of the year. In addition, the PMG Aceh Office conducts monitoring and evaluation of several gampongs in Aceh. Opportunities and challenges faced include central government support, competition, advances in science and technology, limited advice and infrastructure, as well as the quality and quantity of human resources.

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh juga mempunyai ruang fiskal yang lebih apabila dibandingkan dengan provinsi lain, mengingat provinsi ini mendapatkan alokasi Dana Otonomi Khusus dari pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan nilai mencapai Rp8,357 triliun di tahun 2019 (Aceh Jurnal Nasional Networwk, 2018). Jumlah pengangguran di Aceh pada agustus 2020 meningkat menjadi 167 ribu orang (Setyadi, 2020).

Menurut Data BPS Provinsi Aceh jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2018 mencapai 15,97 persen. Angka itu di atas rata-rata nasional yang hanya yaitu 9,66 persen. Hal tersebut membuat Aceh menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi se-Sumatera dan berada pada urutan ke-6 se-Indonesia setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Gorontalo (serambi mekah, 2019). Berikut disajikan pada Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2020.



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Per Agustus 2020

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran bukan hanya dengan memberikan bantuan sosial semata, namun pemerintah bersama-sama dengan aktor yang lain seperti swasta, perguruan tinggi dan Lembaga masyarakat yang lain untuk ikut juga ambil bagian dalam memberikan pengetahuan, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pengawasan kepada masyarakat. Salah satu caranya ialah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi tersebut memberikan dinamika dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya di daerah. Adapun beberapa daerah di Provinsi Aceh yang mampu menjaga dan terus meningkatkan eksistensi produk lokal kepada masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Utara. Setiap daerah memiliki kearifan lokalnya masing-masing, dan potensinya masing-masing seperti Banda Aceh dengan sentra kerajinan tas aceh dan oleh-oleh khas Aceh, Aceh Besar dengan rotannya, Aceh Utara dengan nilamnya, Aceh Tengah dan Gayo dengan kopi dan pesona alamnya.

Sugiri menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat (Sugiri, n.d.). Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah kewajiban pemerintah yang tak dapat dielakkan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keduanya harus bersinergi untuk merumuskan dan menyatukan visi dan misi dalam pemberdayaan masyarakat demi mencapai kesejahteraan

mereka. Tentunya setiap daerah memiliki peluang dan tantangannya masing-masing baik itu dari segi potensi alam yang ada, komoditas unggulannya, kondisi masyarakat, sosial budaya, tingkat pendidikan, dan sebagainya yang mewarnai dinamika proses pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itulah setiap pemerintahan lokal memiliki program unggulannya masing-masing yang kemudian diturunkan menjadi berbagai macam kegiatan yang nantinya dilaksanakannya sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat. Setiap daerah harus mampu untuk mengenali dan memahami komoditas unggulan yang dimiliki beserta peluang potensi lokal yang dapat dikembangkan dan diberdayakan oleh masyarakat nantinya dengan melakukan berbagai inovasi daerah yang belum tentu dimiliki bahkan dilakukan oleh daerah yang lain.

Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus yang memiliki anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan daerah lainnya membuat pemerintah daerah Aceh lebih banyak memiliki program yang bermanfaat untuk membantu mengentaskan kemiskinan dengan berbagai macam program unggulan. Salah satu program unggulan pemerintah Aceh adalah "Aceh Kreatif" yang merupakan salah satu program dari 15 program unggulan pemerintah Provinsi Aceh yang tertuang dalam RPJM Aceh Tahun 2017-2022.

Berdasarkan uraian di atas adapun beberapa pertanyaan penelitian yang akan dikaji selanjutnya yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh Kreatif selama ini dan bagaimana kondisi peluang dan tantangan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan hasil produk dan jasa dari pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh Kreatif.

Adapun beberapa hasil penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Aceh yaitu penelitian dari Alimas Jonsa dengan judul Merekonstruksi model kepemimpinan triple helix (Jonsa, 2015) yang lebih memfokuskan pada sisi kepemimpinan dengan melibatkan swasta dan universitas dalam melaksanakan pembangunan sosial. Kemudian penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan Peraturan Bupati Aceh Barat No.27/2017 mengenai Pedoman Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Desa, dimana masyarakat Aceh Barat terlibat aktif sebagai peserta pemberdayaan desa disertai dengan sumberdaya dan anggaran yang memadai. Selanjutnya penelitian dari Dias Nilasari yang menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Luwu Timur yaitu melalui peningkatan hasil komoditi perikanan dan kelautan, lalu pemerintah daerah juga memberikan pelatihan, bantuan modal dan dukungan sarana prasarana.

Hampir serupa dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Kushandajani dan Indah Ayu Permana bahwa dalam mengimplementasikan program inovasi pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kemampuan kepala desa dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak adalah kunci keberhasilan (Kushandajani & Permana, 2020). Dalam penelitian tersebut semakin meyakinkan bahwa inovasi lokal setiap daerah memiliki dinamika dan keistimewaan masing-masing yang membuat setiap program pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai sesuai yang direncanakan bahkan dapat melebihi ekspektasi. Oleh sebab itulah perlu dilakukan pengkajian sejauh manakah pemerintah

daerah Aceh dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat Aceh melalui Program Aceh Kreatif.

Pemberdayaan merupakan perubahan sosial masyarakat dimana sikap dan perilaku masyarakat diubah untuk memiliki sikap dan perilaku yang positif dan kreatif guna mendorong mereka untuk lebih produktif, mandiri dan lebih berdaya (Safitri & Rahaju, 2015). Memberdayakan masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang saat ini sulit untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan juga keterbelakangan. Secara kemampuan mereka tidak memiliki kekuatan sendiri untuk lepas dari tali kemiskinan, seperti yang dikatakan oleh Wrihatnolo dan Riant Nugroho (Safitri & Rahaju, 2015) bahwa memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan dianggap sebagai kemampuan seseorang atau kelompok yang lemah sehingga mereka mendapatkan kekuatan dalam diri untuk bangkit dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Suharto, 2009).

Tujuan Pemberdayaan menurut Suharto ialah memperkuat masyarakat secara umum dan yang lemah dan tidak berdaya khususnya baik karena anggapan dirinya sendiri maupun karena struktur yang tidak adil. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 pendekatan sebagai berikut (Safitri & Rahaju, 2015):

1. Pemungkinan, yaitu pemberdayaan memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang maksimal.
2. Penguatan, yaitu pemberdayaan dapat memberikan pengetahuan, kemampuan serta kekuatan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.
3. Perlindungan, yaitu pemberdayaan untuk melindungi masyarakat lemah dari persaingan yang tidak sehat dan eksploitasi dari kelompok yang lebih kuat.
4. Penyokongan, yaitu pemberdayaan harus memberikan bimbingan dan dukungan
5. Pemeliharaan, yaitu pemberdayaan ada untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam distribusi kekuasaan

Program Aceh Kreatif merupakan salah satu program unggulan yang dilakukan dengan menggunakan 5 pendekatan di atas, di mana pemerintah Aceh melalui DPMG dan bekerja sama dengan berbagai pihak guna membantu perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan atas produk/jasa yang dihasilkan dari program Aceh Kreatif tersebut.

Secara harfiah inovasi / *innovation* berasal dari kata *to innovate* yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Menurut Zaltman Duncan inovasi adalah ide, tindakan ataupun sesuatu yang sudah ada tetapi diperbaharui oleh sekelompok orang yang mengadopsinya (Sa'ud, 2014). Inovasi kini menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintahan daerah dalam mengelola daerahnya, mengoptimalkan potensi yang ada, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi di daerah. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Khairul Muluk (Muluk, 2008) bahwa inovasi dalam instansi pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan lama yang tak kunjung selesai.

Oleh sebab itu inovasi bukan hanya dipahami hanya sebatas ide kreatif dan baru saja namun inovasi sebagai proses yang dirancang, terprogram, tersusun secara sistematis dengan tujuan yang jelas (Sa'ud, 2014). Ada beberapa tipe inovasi pada sektor publik menurut Muluk yaitu (Muluk, 2008):

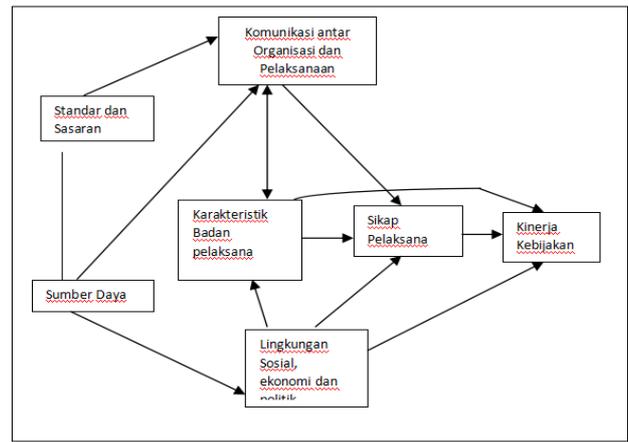
- a. Inovasi produk: perubahan produk layanan yang membedakan dengan produk sebelumnya.
- b. Inovasi Proses: perubahan kualitas yang terus menerus mencakup perubahan prosedur, kebijakan dan pengorganisasian.
- c. Inovasi Metode Pelayanan: Ada perubahan dalam memberikan pelayanan
- d. Inovasi Strategi atau kebijakan: perubahan yang merujuk pada visi, misi, tujuan dan strategi baru dan juga menjawab kondisi nyata yang ada dengan Menyusun kebijakan baru
- e. Inovasi sistem: kebaruan dalam proses interaksi dengan aktor lain dalam rangkaian pengelolaan organisasi yang baru.

Pemerintah Aceh melalui berbagai macam program unggulan sebagai bagian dari inovasi lokal. Salah satu program unggulannya adalah untuk meningkatkan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh Kreatif guna mencapai visi Pemerintah Aceh menjadi Aceh Hebat. Program Aceh kreatif merupakan bagian dari visi dan misi Aceh Hebat, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022. Program ini mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumber daya daerah dan melindungi produk yang dihasilkan melalui penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal serta melindungi produk yang dihasilkan dilakukan melalui:

- a. Penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi lokal dan pasar lokal
- b. Perlindungan produk yang dihasilkan oleh industry lokal sehingga mampu bersaing dengan produk di luar Aceh
- c. Merangsang terbentuknya industri kreatif yang potensial khususnya di sektor jasa.

Program Aceh Kreatif sebagai sebuah program pemerintah yang dan tertuang dalam Qanun Aceh No.1 Tahun 2019 kemudian diimplementasikan ke tengah masyarakat dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn sebagaimana dalam Gambar 1. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn ini bahwa pelaksanaan kebijakan dilihat dari beberapa aspek yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, melihat pada apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan baik berwujud atau tidak, jangka pendek, menengah atau panjang
- b. Kinerja kebijakan adalah penilaian pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan
- c. Sumber daya menunjukkan seberapa besar dukungan finansial dan SDM untuk melaksanakan program atau kebijakan tersebut
- d. Komunikasi antar badan pelaksana, yang melihat pada mekanisme prosedur untuk mencapai sasaran dan tujuan program
- e. Karakteristik badan pelaksana, yang melihat pada seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di dalam birokrasi.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik melihat bahwa lingkungan dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
- g. Sikap pelaksana, yang menunjuk pada sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan.



Gambar 1. Model Implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn (Indiahono, 2017)

Pelaksanaan kegiatan dalam program Aceh Kreatif bukan hanya melibatkan pemerintah saja namun yang terpenting adalah melibatkan masyarakat lokal sebagai SDM nya Kegiatan yang terkait dengan misi dan program aceh kreatif yaitu seperti pengembangan potensi sumber daya alam melalui penerapan inovasi. Dalam pelaksanaan program Aceh kreatif melalui pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong. DPMG memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong.

Keberadaan DPMG Aceh mewakili kekuasaan puncak daerah dalam merencanakan, menjalankan, mengawasi dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat di Aceh. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menjadi ujung tombak masyarakat untuk berdiskusi menggunakan dan mengelola segala kemampuan dan potensi lokal yang dimiliki di daerah masing-masing. Tentunya dengan pelaksanaan pemberdayaan ini pemerintah dituntut untuk memiliki strategi yang tepat agar nantinya tujuan akhir dari program aceh kreatif dapat tercapai.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mengamati gejala ataupun fenomena sosial yang ada di masyarakat kemudian melakukan pengkajian sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu mencari sumber referensi baik buku, laporan, jurnal ilmiah, maupun dokumen lainnya yang terkait dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian direduksi, disajikan lalu setelah itu ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus riset

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Aceh Kreatif

Program Aceh Kreatif merupakan salah satu dari 15 program unggulan pemerintah Aceh yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menekankan pada kreatifitas inovasi dan memnfaatkan potensi lokal yang tersebar di seluruh wilayah dari kota smapaike desa-desa di Aceh. Dalam penelitian ini, ada beberapa aspek yang dikaji untuk melihat pelaksanaan program Aceh Kreatif sebagai berikut:

a. Standart dan sasaran kebijakan

Program Aceh kreatif merupakan bagian dari visi dan misi Aceh Hebat, dan tertuang dalam Qanun Aceh No.1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022.

Selain itu visi misi pemerintah Aceh menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja pemerintah Aceh seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang dalam hal ini menjadi pelaksanaan atas pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh Kreatif. Misi pemerintah Aceh ke-1 yaitu reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan, dimana dalam misi tersebut ada beberapa kegiatan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Lalu pada misi ke-8 ialah membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif, dimana terdapat kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna serta pengembangan potensi sumber daya alam lewat inovasi.

b. Kinerja kebijakan

Kinerja dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut didukung dengan adanya 900 Bumdes yang berjalan inovatif, 115 Bumdes yang berkembang dan mendapatkan omset serta memperoleh PAG (Pendapatan Asli gampong). Selain itu 2000 Bumdes lainnya dalam tahap pendampingan (Surry, 2019). Tentunya hal tersebut menggambarkan bahwa program Aceh Kreatif dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendorong Bumdes di Aceh untuk berinovasi mengeluarkan sebuah produk lokal unggulan di desanya yang dapat mendatangkan profit bagi desanya. Yang kemudian profit tersebut bukan hanya dirasakan oleh beberapa orang namun dirasakan oleh masyarakat desa selalu pengelola dari usaha bumdes yang dilakukan tersebut.

Beberapa usaha telah lahir di desa dari pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh Kreatif ini seperti gampong Cot Kumbang kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan raya yang berhasil mengembangkan ternak ayam sejak 2018, Gampong Rambong Payong Kabupaten Bieureun memproduksi teh celup dari daun kelor yang didampingi dan dibina oleh DPMG Bieureun bersama dengan DPMG Aceh (DPMG Aceh, 2020a), Aceh besar yang memiliki produk unggulan seperti rotan, Selain itu di Aceh Tengah yang memiliki potensi unggulan berupa kopi Gayonya, pesona alam dan budayanya yang dikenal hingga ke dunia internasional. Kemudian pengolahan nilam yang nantinya akan dijadikan desa wisata Nilam di Gampong Rantoe Sabon Aceh Jaya yang diprakarsai oleh pemerintah kab. Aceh Jaya didukung oleh Bank Indonesia, bekerja sama dengan ARC Unsyiah, dan kelompok tani Makmue Beusare, Gampong Kubu, Aceh Barat yang memproduksi produk kerajinan eceng gondok, di gampong Lubuk Pusaka Kabupaten Aceh Utara yang memproduksi olahan kunyit yang dilakukan oleh kaum wanita, di Gampong Jangka Alue Bie Kabupaten Bieureun yang memproduksi pelet pakan ikan terapung.

Dinas PMG Aceh yang melakukan monitoring dan evaluasi kepada beberapa gampong di Aceh seperti Gampong Kubu, Aceh Barat yang memproduksi produk kerajinan eceng gondok, di gampong Lubuk Pusaka Kabupaten Aceh Utara yang

memproduksi olahan kunyit yang dilakukan oleh kaum wanita, di gampong Jangka Alue Bie Kabupaten Bieureun yang memproduksi pelet pakan ikan terapung. Dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut, masyarakat dan pemerintah gampong menaympaikan bahwa masih terkendala terhadap mesin yang kurang memadai, kurangnya keterampilan masyarakat dan belum adanya perlindungan Hak cipta sehingga hal ini perlu untuk dibantu oleh pemerintah daerah setempat untuk mengatasi kendala tersebut (DPMG Aceh, 2020d).

c. Sumber daya

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Aceh Kreatif mendapat dukungan finansial yang cukup setiap tahunnya. Pada RPJM provinsi Aceh Tahun 2017-2020 bahwa program peningkatan keberdayaan masyarakat gampong direncanakan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 14.801.089.700 dan diprediksikan bahwa kondisi anggaran pada akhir RPJM yaitu tahun 2022 sebesar Rp. 30.228.163.243,- tentunya dari besar dukungan anggaran tersebut sebagai wujud keseriusan pemerintah Aceh dalam menjalankan proram Aceh Kreatif melalui DPUMG Aceh. Selain itu dalam RPJM tersebut juga disebutkan bahwa dalam program peningkatan masyarakat gampong dalam membangun gampong mendapatkan dukungan anggaran yang terus meningkat. Selain dari dukungan dana yang dikelola oleh DPMG Aceh, adapun dan desa yang juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di Aceh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti dalam tabel 1.

Tabel 1. Dana Desa Provinsi Aceh tahun 2015-2020

Tahun	Dana Desar (Rp)
2020	4,98 T
2019	4,95 T
2018	4,45 T
2017	4,89 T
2016	3,82 T
2015	1,7 T

Sumber: (DPMG Aceh, 2020b)

Selain itu didukung dengan Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beragam potensi dan komoditi unggulan di berbagai sektor, bahkan beberapa diantaranya memiliki kualitas tinggi di mata internasional seperti nilam, rotan, dan kopi. Beragamnya potensi lokal yang dimiliki Aceh mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan yang melimpah seperti jagung, pisang, papaya, kelapa, sawit, dan sebagainya. Selain itu Aceh juga memiliki potensi alam yang sangat menawan dan patut untuk dikembangkan. Aceh juga memiliki keragaman budaya yang juga menjadi sumber daya Aceh yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Aceh Kreatif.

Kemudian jika dilihat dari aspek sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh kreatif cukup memenuhi dan selama ini mampu menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas dan memberikan kontribusi nyata dalam mensukseskan program Aceh kreatif ini. Pemberdayaan masyarakat di Aceh melalui program Aceh Kreatif ini bukan hanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh saja, namun di tingkat daerah dilakukan oleh DPMG kabupaten/kota dan ditingkat desa dilakukan oleh pemerintah Desa bersama dengan BUMG yang ada. Sedangkan dalam membantu

pemasaran serta keberlangsungan modal usaha nantinya dibantu oleh dinas UMKM dan Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan.

Hanya saja yang perlu untuk terus didorong dan diberikan pelatihan serta pendampingan adalah masyarakat di desa yang tertinggal dan terpinggirkan dengan tingkat pendidikan yang minim perlu diperhatikan lebih agar mereka juga dapat menjadi sumber daya manusia yang berpotensi untuk berdaya secara ekonomi nantinya.

d. Komunikasi antar badan pelaksana

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini hanya sebatas pada dinas tertentu seperti halnya Dinas pemberdayaan Masyarakat Gampong di Aceh. Namun pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh kreatif juga melibatkan berbagai pihak baik itu dari dinas lain seperti dinas UMKM dan koperasi, dinas perindustrian, Dinas pariwisata dan juga pemerintah gampong.

Komunikasi yang terjalin antar badan pelaksana menjadi hal yang begitu penting untuk dipelihara agar maksud dan tujuan program kegiatan dapat tercapai. Tentunya dalam hal komunikasi badan pelaksana dilakukan melalui Focus Group discussion (FGD) kemudian rapat koordinasi yang diselenggarakan secara berkala di awal tahun untuk membahas tentang rencana program awal tahun dengan melibatkan DPMG kabuapten/kota, BPKD kabupaten/kota, KPPN se Aceh, tenaga pendamping profesional provinsi dan juga tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

Selain itu dalam pelaksanaan ada sosialisasi program yang dilakukan oleh pemerintah Aceh baik itu dilakukan oleh DPMG Aceh ataupun P3MD Satker Aceh terkait peraturan maupun program kepada aparat gampong. Contohnya saja ketika dilakukan sosialisasi program Inovasi Desa (PID) yang menjadi salah satu program turunan dari Aceh Kreatif yang dilakukan di Desa untuk menciptakan sebuah inovasi berupa teknologi tepat guna yang dapat membantu meningkatkan ekonomi desa. Kemudian ada proses pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional yang ada, lalu ada proses kunjungan lapangan ke gampong di wilayah Aceh, lalu ada evaluasi yang dilakukan oleh DPMG Aceh dengan DPMG kabupaten/kota serta pemerintah gampong. Dalam setiap proses kegiatan tersebut selalu ada proses komunikasi agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama agar tidak terjadi kesalahan maupun tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

e. Karakteristik badan pelaksana

Pemberdayaan Masyarakat di Aceh dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh. Dinas ini mulai dibentuk beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2016, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan PERGUB no 117/2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat Aceh berganti menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh (Reiza Macella, 2020).

Dinas Pemberdayaan Gampong Aceh memiliki 4 bidang utama yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, Bidang pemerintahan mukim dan gampong, Bidang Lembaga kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong, serta Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber daya Alam dan

Teknologi tepat Guna. Adapun fungsi dari DPMG Aceh yang terkait dengan pemberdayaan adalah :

1. Sebagai perumus kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong,
4. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik menjadi kondisi eksternal organisasi yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan atau implementasi sebuah kebijakan pemerintah. Begitu juga dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh kreatif ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan politiknya.

Kondisi ekonomi di Aceh dapat kita uraikan mulai dari kondisi kemiskinan di Aceh yang mencapai 15,97% dan angka pengangguran tertinggi ke-2 se Sumatera juga mewarnai kondisi ekonomi di Aceh. Padahal jika dilihat dari potensi ekonomi di Aceh sangat menjanjikan. Mulai dari komoditas unggulan yang patut diperhitungkan di dusia kualitasnya seperti Kopi, Nilam, rotan, dan sebagainya. Kemudian ada pisang, jagung, pala, coklat, kelapa, sawit sekor perikanan, dan sebagainya yang dapat dikembangkan untuk menjadi modal atau sumber daya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Melihat kondisi ekonomi di Aceh ini menjadi latar belakang adanya program Aceh kreatif. Kondisi ekonomi sendiri bukan hanya menjadi latar belakang namun juga menjadisasikan akhir atas pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat melalui Aceh kreatif ini. Tentunya hal ini dapat dibuktikan dengan telah terbentuknya BUMG di Aceh atau Bumdes sebagai cikal bakal pemberdayaan ekonomi di desa yaitu sebanyak 5.826 dengan rincian 900 Bumdes telah berkegiatan usaha secara inovatif dan rutin, lalu 2500 Bumdes yang lain dalam tahap perintisan (Surry, 2019).

Kondisi sosial masyarakat Aceh diwarnai dengan cerita konflik di masa lalu yang memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Selain itu kondisi pendidikan di Aceh yang tidak merata, jika dibandingkan dengan kota besar lainnya. Masih banyak daerah Aceh yang tertinggal dan terpinggirkan. Ditambah dengan tingginya angka pengangguran di Aceh mewarnai kondisi sosial di Aceh sendiri. Kondisi sosial tersebut menjadi dinamika tersendiri dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh Kreatif ini. DPUMG melakukan berbagai upaya untuk memotivasi masyarakat desa untuk membentuk Bumdes yang produktif memanfaatkan potensi desa yang ada. Salah satunya ialah dengan memberikan dana bantuan keuangan pembangunan gampong BKPG) di mana syarat untuk mendapatkan dana tersebut, desa harus memiliki Bumdes. Perubahan yang terjadi di desa dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh Kreatif ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat desa khususnya untuk berupaya memberdayakan diri dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka.

g. Sikap pelaksana

Pada setiap awal tahun anggaran dilaksanakan rapat koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas DPMG Aceh dengan melibatkan DPMG kabupaten/kota, BPKD kabupaten/kota, KPPN se Aceh, tenaga pendamping profesional provinsi dan juga tenaga ahli pemberdayaan masyarakat seperti halnya yang baru-baru ini dilakukan yaitu pada 26 Oktober 2020 di Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh (DPMG Aceh, 2020c). Dalam Rapat tersebut bukanya hanya untuk melakukan evaluasi secara rutin namun juga saling berkoordinasi anatar pihak dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran pada tahun berikutnya sehingga diharapkan seluruh pihak mampu untuk bersinergi khususnya desa agar mampu untuk mempromitaskan dana desa yang ada dan mengelolanya dengan baik.

Sehubungan dengan pengelolaan dana desa yang menjadi sumber daya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui Aceh Kreatif ini dapat diapresiasi karena sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat mencapai hasil yang maksimal dengan ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Desa Membangun (IDM) Aceh tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 (DPMG Aceh, 2020c). Hal tersebut menunjukkan kinerja yang baik dari pemerintah dalam mengelola dana desa yang ada.

Secara berkala DPMG sebagai pioner pemberdayaan masyarakat juga melakukan sinkronisasi program kegiatan prioritas pemberdayaan masyarakat gampong dengan pemerintah pusat agar tercapai sinergitas dan kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, seperti yang baru saja dilakukan pada 3 Desember 2020 di Bandung (Mahyuda, 2020).

Pemerintah Aceh dalam hal ini diwakili oleh DPMG baik provinsi maupun kabupaten/kota serta P3MD melakukan sosialisasi baik program maupun peraturan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat kepada aparat dan masyarakat gampong. Sosialisasi ini dilakukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme sebuah pelaksanaan program maupun aturan-aturan yang ada. Selain sosialisasi pemerintah Aceh dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Aceh melalui program Aceh Kreatif ini juga melakukan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat gampong, dan juga pelatihan pengelolaan anggaran dan administrasi kepada aparat desa sebagai langkah agar dana desa yang jumlahnya cukup banyak itu dapat dimanfaatkan secara optimal bukan hanya sekedar membangun fisik saja tapi justru lebih kepada membangun ekonomi desa.

DPMG Aceh juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah kabupaten/kota di Aceh seperti Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Barat, Nagan Raya, dan sebagainya untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat disana melalui usaha yang tengah dilakukan oleh masyarakat di gampong tersebut.

Peluang dan tantangan Pengembangan hasil produk dan jasa dari pemberdayaan masyarakat

1. Peluang

Beberapa peluang ke depan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Aceh dalam mengembangkan produk baik berupa barang ataupun jasa dari hasil pemberdayaan masyarakat

melalui Program Aceh Kreatif ini. Peluang yang ada dapat kita lihat dari sisi luar pemerintah Aceh yaitu Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia sejak 5 tahun yang lalu telah berfokus pada pembangunan desa, dimana setiap desa diberikan dana desa yang adapat mereka kelola untuk kemajuan desa baik dari segi infrastruktur maupun membangun sosial dan ekonomi masyarakatnya seperti dengan pemberdayaan Bumdes nya. Hal tersebut telah di atur dalam PP No. 60 tahun 2014 tentang dana desa. Selain itu dalam permendes juga diatur mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberdayaan di desa yaitu pada PermendesaPDTT no. 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemudian dari sisi pariwisata, pemerintah Indonesia sedang gencar mempromosikan potensi-potensi lokal yang dimiliki setiap daerah untuk diperkenalkan kepada dunia internasional. Oleh sebab itu kesempatan ini tentunya harus dapat dimanfaatkan oleh daerah, khususnya pemerintah Aceh untuk terus juga mendorong inovasi dan kreatifitas daerah dalam mengembangkan sektor pariwisatanya.

Peluang yang lain dapat kita lihat dari sisi finansial dari keberlanjutan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di Aceh dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber seperti dari pemerintah Aceh sendiri yang telah dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh Kreatif, lalu dari dana desa yang dialokasikan untuk Bumdes sebagai salah satu wadah pemberdayaan masyarakat desa, kemudian dari dana CSR dari pihak diluar pemerintah seperti perusahaan swasta. Selain itu pemerintah Indonesia juga menyediakan dana bantuan bagi usaha-usaha kecil masyarakat dengan adanya program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga yang relative rendah, dilanjutkan dengan program bantuan pembiayaan Ultra Mikro (Umi) yang memang sarannya adalah usaha kecil dilapisan terbawah di masyarakat. Kemudian belum lama ini Presiden Jokowi memberikan BLT UMKM sebesar Rp. 2,4jt. Sehingga peluang-peluang bantuan modal usaha ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha hasil pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, demi keberlangsungan usaha ke depan.

Peluang lain adalah perkembangan teknologi yang kini semakin cepat dan menjadi sangat mudah bagi mereka yang memang bisa memanfaatkan peluang ini menjadi salah satu media pemasaran produk. Kecanggihan teknologi saat ini membuat kita seakan-akan tak terpisah oleh jarak dan waktu. Kita dapat menjelajah ke seluruh dunia, termasuk dapat menjual dan membeli produk yang berasal dari mana saja, di mana saja dan kapan saja kita inginkan. Adanya jaringan internet ditambah berbagai *market place* yang jinni banyak tersedia dan dapat kita unduh aplikasinya kita dapat menjual produk dan jasa. Selain itu berbagai media sosial juga dapat menjadi media pemasaran produk. Inilah yang seharusnya mampu untuk dilakukan pemerintah bahkan sampai ke pemerintah desa terkait melakukan strategi pemasaran produk dan jasa dengan memanfaatkan media sosial, *market place*, *website* dan media online lainnya agar dapat memperluas jangkuan pemasaran dan lebih dikenal banyak orang bukan hanya di Indonesia bahkan hingga ke Mancanegara.

Kini di setiap daerah berlomba-lomba untuk mempromosikan kekayaan lokal yang ada di daerahnya baik itu melalui media sosial seperti Instagram, Youtube, website bahkan iklan di televisi. Hal tersebut tentunya menjadi

motivasi yang mendorong setiap daerah untuk tak berhenti berinovasi, berkretifitas memperbaiki yang kurang dan menambah yang belum ada. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh yang terus melakukan inovasi guna meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh salah satunya dengan program Aceh Kreatif ini. Namun sayangnya masih banyak desa yang belum terbentuk Bumdes nya sebagai wadah untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Menjadi tugas bagi pemerintah untuk terus mendorong pemerintah desa untuk terus aktif melibatkan masyarakat desa untuk berdaya secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada di daerahnya masing-masing.

2. Tantangan

Tantangan yang mungkin dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam mengembangkan produk baik berupa barang ataupun jasa dari hasil pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh Kreatif salah satunya adalah persaingan dengan produk barang ataupun jasa yang serupa dan lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri yang pada akhirnya memicu pemerintah bersama dengan masyarakat untuk meninjingatkan inovasi bukan hanya dalam pengembangan produk namun juga salam strategi dna tehnik pemasaran tertentu. Guna menjawab tantangan ini pemerintah Aceh juga telah melakukan pendampingan dan pelatihan serta membantu dalam pemasaran produk barang usaha masyarakat salah satunya dengan menyediakan website khusus menjual produk lokal aceh yang baru-baru ini diresmikan yaitu Acehsale.co.id. Seluruh produk lokal hasil usaha masyarakat dari berbagai kabuoaten/kota se-Aceh dapat diperjualbelikan disini.

Kemajuan teknologi yang begitu cepat saat ini dimana tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat. Seperti halnya kondisi masyarakat di Aceh, di mana masyarakat yang tinggal di desa mayoritas kurang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Sehingga masyarakat desa perlu untuk diberikan pendampingan dan pelatihan bukan hanya dari pemerintah namun juga dapat dilakukan oleh swasta, perguruan tinggi dan Lembaga sosial lainnya.

Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha masyarakat melalui pemberdayaan tadi, misalnya sarana internet yang saat ini di Aceh belum dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah. Sehingga ini dapat menjadi kendala tersendiri ketika masyarakat ingin memasarkan produknya secara online ataupun untuk mengembangkan potensi diri mereka secara daring. Selain itu kondisi infrastruktur juga yang belum merata seperti akses jalan, jembatan, transportasi yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat di Aceh khususnya yang tinggal di desa terpencil menjadi kesulitan dan butuh waktu yang lebih lama untuk menajlankan kegiatan ekonominya.

Beberapa tantangan di atas tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan solusi terbaik demi meningkatkan ekonomi masyarakat di Aceh sehingga angka kemiskinan dan pengangguran dapat terus turun

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Aceh Kreatif telah tertuang jelas dalam Qanun No.1 Th. 2019. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi

msasyarakatnya melalui Aceh kretif ini. Komitmen tersebut dapat kita lihat pada sikap pelaksana pemberdayaan massasyarakat gampong yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Ganpong Aceh. Di dalam tupoksinya jelas membidangi hal tersebut dan dalam alokasi anggaranpun jelas mendapatkan alokasi dengan peningkatan penggunaan dan penyerapan anggaran yang baik. Pemerintah telah menyadari bahwa Aceh memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan dan dikelola sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga nantinya mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Aceh itu sendiri melalui pemberdayaan masyarakat yang digagas melalui program Aceh Kreatif tersebut.

Peluang dan Tantangan akan selalu ada dan menjadi dinamika tersendiri dalam pemberdayaan masyarakat di Aceh ke depan, tentunya optimisme menjadi suatu keharusan bagi pemimpinan dan aparatur daerah Aceh untuk menghadapinya. Sehingga kerja sama dengan mitra yang sudah terjalin selama ini baik dengan perusahaan, organisasi masyarakat, serta perguruan tinggi akan semakin mendukung tercapainya tujuan dari program Aceh Kreatif sebagai bagian dari inovasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh

REFERENSI

- Dana Otonomi Khusus Rp. 8,3 Triliun. Ajnn.Net. <https://www.ajnn.net/news/tahun-2019-aceh-terima-dana-otonomi-khusus-rp-8-3-triliun/index.html>
- DPMG Aceh. (2020a). *BUMG Rambong Payong Produksi Teh Daun Kelor*. <https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pemg/bumg-rambong-payong-produksi-teh-daun-kelor>
- DPMG Aceh. (2020b). *Gampong Sangat Tertinggal Menurun Tajam di Aceh, Dampak dari Penyaluran Dana Desa*. <https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pemg/gampong-sangat-tertinggal-menurun-tajam-di-aceh-dampak-dari-penyaluran-dana-desa>
- DPMG Aceh. (2020c). *KEPALA DPMG ACEH MEMBUKA RAKOR PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/GAMPONG (P3MD/G) TAHUN 2020*. <https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pemg/kepala-dpmg-aceh-membuka-rakor-program-pembangunan-dan-pemberdayaan-masyarakat-desa-gampong-p3md-g-tahun-2020>
- DPMG Aceh. (2020d). *Kepala DPMG Aceh Mengunjungi Pabrik Pelet Pakan Ikan Terapung*. <https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pemg/kepala-dpmg-aceh-mengunjungi-pabrik-pelet-pakan-ikan-terapung>
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (2nd ed.). Gaya Media.
- Jonsa, A. (2015). Merekonstruksi Model Kepemimpinan Triple Helix Dalam Implementasi Pemerdayaan Masyarakat di Era Otonomi. *Jurnal Public Policy*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.696>
- Kushandajani, K., & Permana, I. A. (2020). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 70–80. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318>

- Mahyuda, H. (2020). *Sinkronisasi Perencanaan Pusat Dan Daerah Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Dpmpg.Acehprov.Go.Id.
<https://dpmpg.acehprov.go.id/berita/kategori/sekretariat-dpmpg-aceh/sinkronisasi-perencanaan-pusat-dan-daerah-dalam-bidang-pemberdayaan-masyarakat-des>
- Muluk, K. (2008). *Knowledge Management (Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah)*. Banyumedia Publishing.
- Reiza Macella, A. D. (2020). *Regional Innovation: Regional Leadership in Empowering the Aceh Community during the Covid-19 Pandemic*.
- Sa'ud, U. S. (2014). *Inovasi Pendidikan*. Alfabeta Bandung.
- Safitri, N. A., & Rahaju, T. (2015). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. *Publika*, 3(1), 1-16.
- serambi mekah. (2019). *Aceh Genjot Potensi Ekonomi*. Serambinews.Com.
<https://aceh.tribunnews.com/2019/07/26/aceh-genjot-potensi-ekonomi>
- Setyadi, A. (2020). *167 Ribu Warga Aceh Nganggur, Terbanyak di Kota Ini*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5243244/167-ribu-warga-aceh-nganggur-terbanyak-di-kota-ini>
- Sugiri, L. (n.d.). *Lasiman Sugiri Dosen Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro Abstract This article highlights role of it ' s the local government and his staff in executing duty or function of community empowerment , including identifying supporter facto*. 56-65.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Surry, K. (2019). *DPMG Dorong Optimalkan peran 5.826 BUMDes di Aceh*. Antara Aceh.
<https://aceh.antaraneews.com/berita/101876/dpmpg-dorong-optimalkan-peran-5826-bumdes-di-aceh>.